KUMPULAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Koran Tempo | Tanggal : 15 Januari 2011

Subyek : Emisi | Hal : B4

AS Kucurkan Rp 4,5 Triliun untuk Kurangi Emisi

Daerah terkadang takpintar menangkap potensi panas bumi.

Amerika Sarikat dan United States Agency for International Development (USAID) menggelontorkani S$ 500 juta atau sekitari Rp 4,5 triliun untuk program penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia dalam lima tahun Ke depan Danu itu dipakai dalam pengembangan energi bersih , konservasi hutan dan laut serta pendidikan masyarakat menghadapi perubahan iklim

Duta Besar AS untuk Indonesia, Scot Marciel, mengatakan Indonesia berperan penting mengatasi dampak perubahan iklim yang dihadapi dunia saat Ini. Peran itu bermula saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri pertemuan G-20 di Pittsburgh. Amerika, dua tahun lalu. Ketika itu Yudhoyono mengumumkan target mengurangi emisi 26-41 persen pada 2020 jika mendapat bantuan Internasional.

Dalam hal energi bersih, kedua pemerintah bermitra dalam pengembangan energi panas bumi sebagai bahan bakar pembangkit listrik Marciel mengatakan potensi pemanfaatan energi ini sangat besar. Hampir 40 persen potensi panas bumi ada di negara ini. yang menghasilkan listrik hingga 27 ribu megawatt (MW) "AS berkomitmen membantu Indonesia mencukupi target tersebut," kuta Marciel di Jakarta kemarin

Direktur USAID Indonesia Walter North mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia melakukan banyak perubahan dalam hal regulasi untuk mendukung iklim investasi panas bumi. "Ada banyak komitmen investasi swasta di sektor ini. Beberapa juga sudah menang tender," katanya. "Ini yang sedang dikembangkan dan Anda akan segera melihat hasilnya."

Namun kurangnya informasi dari pihak yang melakukan tender, seperti pemerintah daerah, terkadang menghambat pengembangan panas bumi. Karena itu, dana yang sudah dikucurkan, sebanyak US$ 245,7 juta, dapat dimanfaatkan untuk memberi pelatihan bagi pemerintah daerah agar mengerti dalam menangkap peluang potensi panas bumi.

Hingga 2025, pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berkapasitas 12 ribu MW. Untuk merealisasi target itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengajukan 9 wilayah kerja panas bumi (WKP). Kini pemerintah tengah melakukan survei pendahuluan. "Setelah selesai, baru bisa ditetapkan menjadi WKP," kata Direktur Panas Bumi Sugiharto Harsoprayitno.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Lingkungan Hidup

PLTP yang diusulkan secara formal kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjadi WKP, antara lain, Bonjol di Sumatera Barat dengan potensi 200 MW, Danau Ranau di Sumatera Selatan (210 MW), dan Mataloko di Nusa Tenggara Barat (63 MW). Namun Sugiharto berharap sembilan lokasi itu segera menjadi WKP, mengingat potensi yang besar, 1.334 MW. Sebelumnya, pemerintah memastikan 2.000 MW pembangkit listrik panas bumi yang masuk dalam proyek percepatan 10 ribu MW tahap kedua bakal beroperasi pada 2014. Di antara pembangkit itu, 15 WKP milik Pertamina. WKP tersebut termasuk proyek kerja sama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dengan PT PLN (Persero) berkapasitas 510 MW.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Lingkungan Hidup